

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja (Renja) Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab Sidrap Tahun 2024 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD Tahun 2024 - 2026) dengan berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 52 tahun 2022 tentang penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru (DOB). Oleh karena itu, Kabupaten Sidenreng Rappang yang pada tahun 2023 akan berakhir masa jabatan kepala daerah sehingga diperlukan kepastian hukum penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah hingga tahun 2026 yaitu melalui penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026.

Sementara itu searah dengan penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap OPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) OPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra OPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2024 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja OPD.

Sesuai amanat tersebut maka Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai Organisasi Perangkat Daerah pada tahun 2024 ini menyusun

Rencana Kerja Bappelitbangda Tahun 2024

Rencana Kerja Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2024. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen rencana pembangunan OPD yang berjangka.

Rencana Kerja Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2024 merupakan turunan dari dokumen rencana strategis periode 2024 - 2026. Yang tentunya tetap mengacu pada rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2024–2026 seperti yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang

Renja ini akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2024 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat, provinsi yang dilaksanakan di daerah.

Rencana Kerja OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dalam prosesnya, penyusunan renja OPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD, oleh karena itu penyusunan rancangan renja OPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting OPD, evaluasi pelaksanaan renja OPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian renstra OPD

Penyusunan renja OPD yang dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup

a. Tahap perumusan rancangan renja OPD

Keterkaitan antara rencana kerja OPD dengan Dokumen RKPD dapat dilihat dalam bagan tersebut di bawah ini :



1.2. LANDASAN HUKUM

- a. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pemebentukan Daerah – Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- b. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- c. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesi Nomor 6322);
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- f. Permendagri No 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);.
- g. Permendagri No 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- h. Permendagri No 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 255);
- i. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru
- j. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 301) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 314);

- k. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor Tanun Tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026);
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 06 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019 Nomor 6, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturaran Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 208-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappppang Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng rappang Nomor 26) ;
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012-2032 (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26)

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Kerja Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2024 dimaksudkan untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2024.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Bappelitbangda adalah:

- 1. Mengevaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Bappelitbangda sampai dengan Triwulan II Tahun 2023
- 2. Mengoptimalkan peran dan fungsi perencanaan dalam pembangunan daerah.
- 3. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN, pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja OPD yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra

OPD, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja OPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD, berisikan uraian mengenai Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan OPD, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD, Dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan SDGs (Millenium Development Goals), Tantangan dan peluang serta Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Menguraikan tentang tujuan sasaran jangka menengah bappelitbangda

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Menguraikan tentang program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahu anggaran 2024

BAB V PENUTUP, menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya

maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA OPD

Rencana Kerja Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Bappelitbangda. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang selama tahun 2024.

Pelaksanaan Renja tersebut terintegrasi dalam Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang disusun sebagai alat kendali dan tolak ukur bagi manajemen dalam penyelenggaraan pembangunan 5 (lima) tahun dan tahunan.

Adapun untuk tahun anggaran 2022 dengan terdiri dari 4 Program, 16 Kegiatan dan 54 Sub Kegiatan dengan anggaran belanja sebelum perubahan sebesar Rp. 7.030.707.500 dan Anggaran Setelah Perubahan Rp. 7.030.707.500 dengan realisasi sampai dengan realisasi belanja 6.323.510.034 (89.94%) dan Realiasi Fisik (99.46%) kegiatan diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100 % atau minimal sama dengan tahun 2023, baik realisasi keuangan maupun realisasi fisik.

Apabila dikaitkan dengan pencapaian visi dan misi Kabupaten Sidenreng Rappang, pada dasarnya kegiatan Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagai “*Pengarah*”. Setiap program

pembangunan dan sistem yang akan memberikan kemudahan bagi OPD untuk menentukan arah dan sasaran kegiatan, lingkup dan pengukuran tingkat kesuksesannya.

Kegiatan evaluasi hasil pelaksanaan renja OPD tahun lalu dan pencapaian kinerja renstra OPD ditujukan untuk mengidentifikasi bagaimana kemampuan OPD dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan renstra OPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Renja yang disusun juga ditujukan untuk memacu penyelenggaraan pembangunan agar lebih terarah dan menjamin tercapainya sasaran strategis pembangunan tahun mendatang. Bagi manajemen Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan pengembangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang. Renja dipandang sebagai :

- Alat bantu penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- Gambaran tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang untuk mengantisipasi tantangan pembangunan yang dihadapi.
- Alat untuk memacu dan memicu aparat serta masyarakat dalam proses pencapaian sasaran yang ditetapkan.

Renja sebagai alat bagi manajemen, memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah selaras dengan upaya pencapaian visi, misi dan tujuan/sasaran strategis. Dalam dokumen Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang secara formal didefinisikan pernyataan visi, misi, tujuan/sasaran strategis serta strategi pencapaiannya.

Adapun rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD Tahun 2022 dan pencapaian Renstra Tahun 2022 Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 1
REKAPITULASI HASI EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2019 DAN PENCAPAIAN RENSTRA s/d TAHUN 2022
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

No	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome) /Kegiatan(output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran kegiatan SKPD Tahun 2022			Target Program /Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program /Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s.d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra %)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10(5+7+9)	11(10/4*100
1	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan									
	PERENCANAAN		100	100	100	100	100.00	100	100	100.00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan	100	100	100	100	100.00	100	22.26	22.26
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100	100	100	100	100.00	100	41.67	41.67
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Yang Disusun	24	8	8	8	100.00	8	2	25.00

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian dan ikhtisar realisasi kinerja skpd yang disusun	15	5	5	5	100.00	5	5	100.00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Yang Disusun	12	4	4	4	100.00	4	1	25.00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah	100	100	100	100	100.00	100	25.00	25.00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Waktu penyediaan gaji dan tunjangan ASN	36	12	12	12	100.00	12	3	25.00
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Waktu pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi administrasi keuangan	36	12	12	12	100.00	12	3	25.00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran	54	18	18	18	100.00	18	3	25.00
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi barang milik daerah	100	100	100	100	100.00	100	25.00	25.00
2	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Waktu pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah	36	12	12	12	12.00	12	3	25.00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kegiatan administrasi umum perangkat daerah	100	100	100	98	98.00	100	25.00	25.00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100	100	90	80	88.89	100	15	25.00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan yang Tersedia	260	70	24	24	100.00	75	1	25.00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan dan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	72	10	5	5	100.00	55	1	25.00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan	270	150	155	155	100.00	91	10	21.00
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Waktu Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD	36	12	12	12	12.00	12	0	0

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelaksanaan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100	100	100	100	100.00	100	0	0
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah dan jenis peralatan dan mesin yang diadakan	7	7	7	7	7.00	7	0	0
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan	100	100	100	100	100.00	100	25	25
4	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Dokumen Bermaterai	700	700	700	650	92.86	314	65	20.00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	36	12	12	12	100.00	12	1	15.00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	36	12	12	12	100.00	12	1	10.00
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan	100	100	100	100	100.00	100	10.00	10.00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah dan Jenis Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara	18	18	15	10	66.67	15	1	15
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Bangunan Gedung Kantor Yang Dipelihara	1	1	1	1	100.00	100	0	0
7	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana Prasarana Pendukung Bangunan Gedung Kantor yang dipelihara/direhabilitasi	30	30	24	24	100.00	24	1	15.00
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase pelaksanaan tahapan perencanaan pembangunan daerah tepat waktu	100	100	100	100	100	100	85.00	85.00
		Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Program RPJMD	100	100	100	100	100	100	25.00	25.00

8	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan dan pendanaan yang ditetapkan dengan Perda dan Perkada	100	100	100	100	100.00	100	85.00	85.00
	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Dokumen Gambaran Umum Kondisi Daerah	45	10	2	2	100.00	15	1	100.00
	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Berita Acara saran perbaikan rancangan Awal RKPD	6	6	6	6	100.00	1	1	100.00
9	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat daerah	Usulan Musrembang yang diselaraskan dengan Program/Kegiatan Perangkat Daerah	1400	1400	1400	1400	1400	1827	1827	100.00
	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Berita Acara Hasil Musrenbang	1	1	1	1	1.00	1	1	100.00
	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	1	1	1	1	1.00	1	1	100.00
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rancangan Awal, Rancangan Akhir RKPD, Perkada RKPD dan Perda RPJMD	4	4	4	4	4.00	3	1	35.00
	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah	100	100	100	100	100	100	1	25.00
10	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Aplikasi data/informasi perencanaan pembangunan	1	1	4	4	1.00	1	1	25.00
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pencapaian target Indikator Perencanaan Pembangunan Daerah	100	100	100	100	100	100	1	25.00
	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Laporan capaian kinerja dan keuangan pelaksanaan APBD Kab, APBD Provinsi, DAK, APBN/PHLN, Hibah, Cukai Tembakau, Pajak Rokok, TP dan	4	4	4	4	4.00	4	1	25.00

		Dekonsentrasi								
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Kesesuaian Program Perangkat Daerah dengan Sasaran Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100	100	100	100	100	100	25.00	25.00
		Persentase Kesesuaian Program Perangkat Daerah dengan Sasaran Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Perekonomian dan SDA	100	100	100	100	100	100	25.00	25.00
		Persentase Kesesuaian Program Perangkat Daerah dengan Sasaran Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	100	100	100	100	100	100	25.00	25.00
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Kesesuaian Program Perangkat Daerah dengan Sasaran Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100	100	100	100	100	100	25.00	25.00
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang dikoordinasikan	33	33	33	33	33.00	33	33	100.00
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Daerah Bidang Pemerintahan yang diasistensi	44	44	44	44	44.00	44	44	100.00

	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Daerah Bidang Pemerintahan yang dimonitoring dan dievaluasi	44	44	44	44	44	44	44	100.00
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Perencanaan bidang Pemerintahan yang disenirgikan	33	33	33	33	33	33	33	100.00
11	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang dikoordinasikan	12	12	12	12	12	12	12	100.00
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia yang disinergikan	6	6	6	6	6.00	6	6	100.00
12	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Kesesuaian Program Perangkat Daerah dengan Sasaran Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Perekonomian dan SDA	100	100	100	100	100.00	100	25.00	25.00
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian yang dikoordinasikan	100		100	100		100	100	100.00
13	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian yang disinergikan	6	6	6	6	6	6	6	100.00
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang SDA yang dikoordinasikan	3	3	3	3	3	3	3	100.00

Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang SDA yang disinergikan	6	6	6	6	6	6	6	100.00
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Kesesuaian Program Perangkat Daerah dengan Sasaran Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	100	100	100	100	100	100	25.00	25.00
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur yang dikoordinasikan	15	15	15	15	15	15	5	25.00
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur yang diasistensi	20	20	20	20	20	20	4	25.00
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Pertencanaan Bidang Infrastruktur yang di Monitorig dan Evaluasi	20	20	20	20	20	20	5	25.00
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur yang disinergikan	3	3	3	3	3	3	3	25.00
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Kewilayahan yang dikoordinasikan	33	33	33	33	33	33	7	25.00
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Kewilayahan yang diasistensi	36	12	12	12	100	12	3	33.33

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Kewilayahan yang dimonitoring	44	44	44	44	44	44	10	25.00
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Kewilayahan yang disinergikan	9		3	3	100	3	1	25.00
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang SDA yang disinergikan	100	100	100	100	100	100	100	100.00
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Kesesuaian Program Perangkat Daerah dengan Sasaran Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	100	100	100	100	100	100	100	100.00
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur yang dikoordinasikan	100	100	100	100	100	100	100	100.00
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Daerah Bidang Infrastruktur yang diasistensi	1	1	1	1	1	1	0	0
Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru Dan/Atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah Dokumen Bidang Infrastruktur yang di Monitorig dan Evaluasi	1	1	1	1	1	0	0	0
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur yang disinergikan	1	1	1	1	1	0	0	0
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan Ketatalaksanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Kewilayahan yang dikoordinasikan	1	1	1	1	1	1	0	0

Fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan data dan pengkajian peraturan	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Kewilayahan yang diasistensi	1	1	1	1	1			
Pengelolaan data kelitbangan dan peraturan	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Kewilayahan yang dimonitoring	1	1	1	1	1	1	10.00	10.00
Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan	100	100	100	100	100	100	5.00	5.00
Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Persentase hasil Kelitbangan bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang dimanfaatkan Perangkat Daerah	1	1	1	1	1	1	5.00	5.00

TABEL 2.
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SKPD
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah

No	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Penunjang Urusan									
	Perencanaan Pembangunan									
	Penjabaran Konsistensi Program RKPD Kedalam APBD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Penjabaran Konsistensi Program RKPD Kedalam APBD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Penelitian Dan Pengembangan									
	Persentase hasil penelitian /kajian yang dimanfaatkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Pada tabel evaluasi hasil renja tahun 2023 s.d Triwulan II menggambarkan target kinerja renstra.

2.2.

ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI BAPPELITBANGDA

Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah merupakan instansi yang memiliki tugas pokok dan fungsi perencanaan dan penganggaran yang bersifat lintas wilayah, sektoral dan waktu yang diharapkan dapat mengakomodasi kebijakan-kebijakan pembangunan wilayah dan sektoral secara menyeluruh dalam satu kesatuan pembangunan wilayah. Tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah yaitu melaksanakan tugas umum pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan ekonomi, sosial budaya, penelitian dan pembangunan, pengembangan infrastruktur dan engembangan wilayah. Sistem perencanaan pembangunan yang terpadu, sistematis, dan terarah merupakan sebuah keharusan untuk menghasilkan pembangunan yang berkualitas, efektif dan efisien

Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati Sidenreng Rappang

Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah sesuai dengan Peraturn Bupati Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kabupaten Sidenreng Rappang terdiri dari :

1. Unsur Pimpinan yaitu : Kepala Badan
2. Unsur Pembantu Pimpinan yaitu Sekretariat yang terdiri dari :
 - a. Subag Umum dan Kepegawaian
 - b. Subag Perencanaan
 - c. Subag Keuangan
3. Unsur Pelaksana yaitu :
 - a. Bidang Perencanaan Perekonomian , Sumber Daya Alam, Sosial dan Pembangunan Manusia

- b. Bidang Perencanaan Infrastruktur, Kewilayahan dan Pemerintahan.
- c. Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah
- d. Bidang Perencanaan Pengendalian & Evaluasi.

Tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yang akan dipakai landasan penyusunan program dengan mengantisipasi perkembangan di masa mendatang, sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang perencanaan;
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- d. Pelaksanaan administrasi badan; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan yang terpadu, sistematis dan terarah masih terdapat beberapa permasalahan yaitu:

- 1. Kurangnya ketersediaan data dan informasi secara kuantitas dan kualitas sebagai pendukung perencanaan pembangunan.
- 2. Masih lemahnya koordinasi antar OPD maupun antar bidang di lingkungan internal Bappelitbangda.
- 3. Terbatasnya kemampuan aparatur Bappelitbangda dalam perencanaan pembangunan.
- 4. Perencanaan pembangunan yang belum konsisten dalam perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan.
- 5. Perencanaan pembangunan yang belum terpadu
- 6. Kurangnya pengendalian dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah mengubah pola perencanaan yang ada, dimana Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang

disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses *bottom-up dan top down*, yang disebut dengan istilah dari *shopping list* ke *working plant*.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini, memberikan indikasi terhadap kebenaran pernyataan diatas.

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan-kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini.

Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi perencana dalam hal ini Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang yang membantu Kepala Daerah dalam Perencanaan Pembangunan Daerah, sehingga semakin profesional dalam bidang tugasnya. Untuk itu kualitas aparatur dan sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan *good governance*.

Pada umumnya kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Sidenreng Rappang mengalami peningkatan. Beberapa indikator yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tersebut meliputi :

1. Tersedianya sarana/prasarana dan sumber pembiayaan yang cukup untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Adanya penyelenggaraan mekanisme perencanaan pembangunan yang bersifat partisipatif.

3. Adanya keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan antara lain : DPRD, LSM, Lembaga masyarakat tingkat desa.
4. Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran.
5. Meningkatnya efektifitas produk-produk pengembangan dan penelitian berupa hasil kajian, yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan pembangun

TABEL 3

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL SKPD TAHUN 2024

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			100%	5,536,570,349				100%	5,536,570,349	
1	PERENCANAAN	Bappedalibangda		100%	5,036,570,349		Bappedalibangda		100%	5,036,570,349	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan	100%	4,136,570,349	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan	100%	4,136,570,349	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	21,500,349	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	21,500,349	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	8 Dok	15,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	8 Dok	15,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah laporan capaian dan ikhtisar realisasi kinerja skpd dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	5 Lap	3,500,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah laporan capaian dan ikhtisar realisasi kinerja skpd dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	5 Lap	3,500,000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Lap	3,000,349	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Lap	3,000,349	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	3,521,786,019	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	3,521,786,019	

	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN	46 Orang x 14 Bulan	3,496,786,019	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN	46 Orang x 14 Bulan	3,496,786,019	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Vertifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	20,000,000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Vertifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	20,000,000	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Bappedalibangda	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	18 Laporan	5,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Bappedalibangda	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	18 Laporan	5,000,000	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Barang Milik Daerah	100%	4,000,000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Barang Milik Daerah	100%	4,000,000	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	4,000,000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	4,000,000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	116,400,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	116,400,000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4,000,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4,000,000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4,000,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4,000,000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	5,400,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	5,400,000	
3	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bappedalibangda	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	180 Laporan	100,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bappedalibangda	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	180 Laporan	100,000,000	

4	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Bappedalibangda	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	12 Dokumen	3,000,000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Bappedalibangda	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	12 Dokumen	3,000,000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Cakupan Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	25,000,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Cakupan Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	25,000,000	
	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Paket	10,000,000	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Paket	10,000,000	
5	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bappedalibangda	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	15,000,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bappedalibangda	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	15,000,000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	100%	341,999,651	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	100%	341,999,651	
6	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	414 Laporan	5,000,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	414 Laporan	5,000,000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	72,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	72,000,000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	264,999,651	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	264,999,651	
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bappedalibangda	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	105,884,330	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bappedalibangda	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	105,884,330	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15 Unit	29,354,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15 Unit	29,354,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	50,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	50,000,000	

	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	26,530,330	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bappedalibangda	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	70,000,000	
8	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Bappedalibangda	Persentase Konsistensi Program RPD-RKPD	100%	500,000,000	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		Persentase Konsistensi Program RPD-RKPD	100%	500,000,000	
			Persentase Konsistensi Program RKPD-APBD	100%				Persentase Konsistensi Program RKPD-APBD	100%		
			Persentase Rata Rata Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah	100%				Persentase Rata Rata Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah	100%		
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		Persentase tersusunnya dokumen perencanaan dan pendanaan yang ditetapkan dengan Perda dan Perkada	100%	383,000,000	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		Persentase tersusunnya dokumen perencanaan dan pendanaan yang ditetapkan dengan Perda dan Perkada	100%	383,000,000	
	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah		Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	3 dokumen	28,000,000	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah		Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	3 dokumen	28,000,000	
	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya		Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	3 dokumen	25,000,000	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya		Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	3 dokumen	25,000,000	
	Pelaksanaan Konsultasi Publik		Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2 Berita Acara	40,000,000	Pelaksanaan Konsultasi Publik		Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2 Berita Acara	40,000,000	
	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD		Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara	20,000,000	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD		Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara	20,000,000	
	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota		Jumlah Berita Acara Musreimbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	70,000,000	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota		Jumlah Berita Acara Musreimbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	70,000,000	
	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan		Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	1420 Usulan	25,000,000	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan		Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	1420 Usulan	25,000,000	

	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	2 Dokumen	175,000,000	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	2 Dokumen	175,000,000	
10	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappedalibangda	Persentase ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah	100%	67,000,000	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappedalibangda	Persentase ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah	100%	67,000,000	
	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	3 Dokumen	67,000,000	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	3 Dokumen	67,000,000	
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Persentase Pencapaian target Indikator Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	50,000,000	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Persentase Pencapaian target Indikator Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	50,000,000	
	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	8 Laporan	50,000,000	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	8 Laporan	50,000,000	
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Bappedalibangda	Persentase Keselarasan antar dokumen perencanaan (RPD-Renstra, RKPD-Renja) Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100%	400,000,000	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Bappedalibangda	Persentase Keselarasan antar dokumen perencanaan (RPD-Renstra, RKPD-Renja) Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100%	400,000,000	
			Persentase Keselarasan antar dokumen perencanaan (RPD-Renstra, RKPD-Renja) Lingkup Bidang Perekonomian dan SDA	100%				Persentase Keselarasan antar dokumen perencanaan (RPD-Renstra, RKPD-Renja) Lingkup Bidang Perekonomian dan SDA	100%		

11			Persentase Keselarasan antar dokumen perencanaan (RPD-Renstra, RKPD-Renja) Lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	100 %				Persentase Keselarasan antar dokumen perencanaan (RPD-Renstra, RKPD-Renja) Lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	100 %		
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		Persentase Keselarasan antar dokumen perencanaan (RPD-Renstra, RKPD-Renja) Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 %	95,000,000	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		Persentase Keselarasan antar dokumen perencanaan (RPD-Renstra, RKPD-Renja) Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 %	95,000,000	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)	48 Dokumen	5,000,000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)	48 Dokumen	5,000,000	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	48 Laporan	5,000,000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	48 Laporan	5,000,000	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	48 Laporan	10,000,000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	48 Laporan	10,000,000	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	48 Laporan	30,000,000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	48 Laporan	30,000,000	

Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	16 Dokumen	10,000,000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	16 Dokumen	10,000,000	
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	16 Laporan	5,000,000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	16 Laporan	230,000,000	
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	16 Laporan	10,000,000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	16 Laporan	10,000,000	
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	16 Laporan	20,000,000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	16 Laporan	20,000,000	
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		Persentase Keselarasan antar dokumen perencanaan (RPD-Renstra, RKPD-Renja) Lingkup Bidang Perekonomian dan SDA	100%	155,000,000	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		Persentase Keselarasan antar dokumen perencanaan (RPD-Renstra, RKPD-Renja) Lingkup Bidang Perekonomian dan SDA	100%	155,000,000	
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	16 Dokumen	15,000,000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	16 Dokumen	15,000,000	

	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	16 Laporan	10,000,000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	16 Laporan	10,000,000	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	16 Laporan	5,000,000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	16 Laporan	5,000,000	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	16 Laporan	10,000,000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	16 Laporan	10,000,000	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	8 Dokumen	5,000,000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	8 Dokumen	5,000,000	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	8 Laporan	5,000,000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	8 Laporan	335,000,000	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	8 Laporan	5,000,000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	8 Laporan	5,000,000	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	8 Laporan	100,000,000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	8 Laporan	100,000,000	

	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		Persentase Keselarasan antar dokumen perencanaan (RPD-Renstra, RKPD-Renja) Lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	100%	150,000,000	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		Persentase Keselarasan antar dokumen perencanaan (RPD-Renstra, RKPD-Renja) Lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	100%	150,000,000	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	20 Dokumen	5,000,000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	20 Dokumen	5,000,000	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	20 Laporan	5,000,000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	20 Laporan	5,000,000	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	20 Laporan	20,000,000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	20 Laporan	20,000,000	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD Pada Bidang Infrastruktur	20 Laporan	45,000,000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD Pada Bidang Infrastruktur	20 Laporan	45,000,000	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	52 Dokomen	5,000,000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	52 Dokomen	5,000,000	

	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	52 Laporan	5,000,000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	52 Laporan	1,500,000,000	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	52 Laporan	20,000,000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	52 Laporan	1,500,000,000	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD Pada Bidang Kewilayahan	52 Laporan	45,000,000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD Pada Bidang Kewilayahan	52 Laporan	1,450,000,000	
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				500,000,000	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				500,000,000	
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		Persentase hasil litbang yang dimanfaatkan oleh perangkat daerah	100%	500,000,000	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		Persentase hasil litbang yang dimanfaatkan oleh perangkat daerah	100%	500,000,000	
			Persentase Perangkat Daerah yang menghasilkan inovasi	100%				Persentase Perangkat Daerah yang menghasilkan inovasi	100%		
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		Persentase hasil Kelitbangan bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang dimanfaatkan Perangkat Daerah	100%	300,000,000	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		Persentase hasil Kelitbangan bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang dimanfaatkan Perangkat Daerah	100%	300,000,000	
	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	1 Laporan	100,000,000	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	1 Laporan	100,000,000	

	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan Ketatalaksanaan		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	2 Laporan	100,000,000	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan Ketatalaksanaan		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	2 Laporan	100,000,000	
	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	1 Laporan	75,000,000	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	1 Laporan	75,000,000	
	Pengelolaan data kelitbangan dan peraturan		Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terekelolah dengan baik	1 Laporan	75,000,000	Pengelolaan data kelitbangan dan peraturan		Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terekelolah dengan baik	1 Laporan	75,000,000	
	Fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan data dan pengkajian peraturan		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	1 Laporan	50,000,000	Fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan data dan pengkajian peraturan		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	1 Laporan	50,000,000	
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi		Persentase hasil Inovasi yang diterapkan di daerah	100 %	100,000,000	Pengembangan Inovasi dan Teknologi		Persentase hasil Inovasi yang diterapkan di daerah	100 %	100,000,000	
	Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi		Jumlah dokumen hasil Penelitian, pengembangan dan perekayasaan di bidang teknologi dan inovasi	1 Laporan	50,000,000	Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi		Jumlah dokumen hasil Penelitian, pengembangan dan perekayasaan di bidang teknologi dan inovasi	1 Laporan	50,000,000	
	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun / Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi		Jmlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan rancang bangun /model replikasi dan invensi di bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi	5 Laporan	25,000,000	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun / Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi		Jmlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan rancang bangun /model replikasi dan invensi di bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi	5 Laporan	25,000,000	

Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual		Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelekteual	3 Laporan	25,000,000	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual		Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelekteual	3 Laporan	25,000,000	
-------------------------------------	--	---	-----------	------------	-------------------------------------	--	---	-----------	------------	--

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Tujuan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi suatu organisasi, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau apa yang akan dihasilkan dalam jangka waktu suatu perencanaan.

Tujuan yang akan dicapai oleh Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 berdasarkan rumusan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 adalah Meningkatkan kualitas kinerja perencanaan, pengendalian, evaluasi pembangunan, Data serta Penelitian dan Pengembangan yang sesuai dengan perumusan strategi dan arah kebijakan, program prioritas dan kegiatan secara terukur, jelas dan tepat sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan atau merupakan tujuan antara. Ini berarti bahwa tujuan akan tercapai apabila sasaran bisa terpenuhi atau dengan kata lain berhasil

Prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 dirumuskan untuk mencapai target janji bupati dan wakil bupati yang tertuang dalam visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang yang termaktub dalam dokumen Perubahan RPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026.

Searah dengan itu Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Jangka Menengah merumuskan Tujuan dan Sasaran Tahun 2024 - 2026 Tertuang dalam Rencana Strategis Bappelitbangda Tahun 2024-2026 sesuai pada Tabel di bawah :

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Formulasi	Satuan	Kondisi Awal 2021/2022	Target		
							2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas		Nilai Sakip Kabupaten Komponen Perencanaan Kinerja	Penilaian Kemenpan RB	Poin	21.30	22.31	22.84	23.37
		Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah	Persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah	Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00
				Persentase keselarasan dokumen perencanaan daerah dengan dokumen perencanaan perangkat daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dalam Mendukung Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Penilaian APIP	Poin	BB	BB	A	A
2	Mewujudkan Penelitian dan Pengembangan yang Inovatif		Indeks Inovasi Daerah	Penilaian Kemendagri	Poin	39.52	48.25 (Inovatif)	53.15 (Inovatif)	60.01 (Inovatif)
		Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan	Persentase rekomendasi hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti di kabupaten sidenreng rappang	Jumlah hasil penelitian yang ditindaklanjuti/jumlah kelitbangan yang dihasilkan x 100	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah merupakan instansi yang memiliki tugas pokok dan fungsi perencanaan dan pengendalian yang bersifat lintas wilayah, sektoral dan waktu yang diharapkan dapat mengakomodasi kebijakan-kebijakan pembangunan wilayah dan sektoral secara menyeluruh dalam satu kesatuan pembangunan wilayah. Tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Daerah yaitu melaksanakan tugas umum pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan ekonomi, sosial budaya, penelitian dan pembangunan, fisik dan prasarana. Sistem perencanaan pembangunan yang terpadu, sistematis, dan terarah merupakan sebuah keharusan untuk menghasilkan pembangunan yang berkualitas, efektif dan efisien, dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan yang terpadu, sistematis dan terarah masih terdapat beberapa permasalahan yaitu:

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Ketersediaan Data Belum Akurat	Ketersediaan data akurat belum memadai	- Lemahnya manajemen data - Perbedaan sumber data dan informasi
2.	Monitoring dan evaluasi yang belum optimal	Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah belum optimal	- Dokumen perencanaan dan penganggaran belum konsisten - Ketersediaan analisa capaian kinerja belum optimal
3.	Koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan daerah belum optimal	Belum optimalnya proses koordinasi dan sinkronisasi	Perencanaan anggaran pada dokumen perencanaan belum didasarkan pada rincian kebutuhan

4	Belum optimalnya pemanfaatan hasil hasil kelitbangan untuik digunakan dalam pengambilan kebijakan perencanaan pembangunan daerah	Pelaksanaan kegiatan kelitbangan belum sepenuhnya diarahkan untuk menjawab permasalahan pembangunan	- Penelitian dan pengembangan yang sudah dilakukan belum sepenuhnya di manfaatkan hasilnya oleh perangkat daerah dan pemangku kepentingan - SDM dan fasilitas pendukung belum memadai baik secara kualitas maupun kuantitas
---	--	---	--

4.3. PROGRAM DAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Bappelitbangda sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan pengelolaan perencanaan pembangunan daerah dan membantu Bupati dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produk berupa rencana pembangunan daerah.

Pada dasarnya kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagai “*pengarah*” setiap program pembangunan dan sistem yang akan memberikan kemudahan bagi OPD untuk menentukan arah dan sasaran kegiatan, lingkup dan pengukuran tingkat kesuksesannya.

Untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan lingkup bappelitbangda sumber Anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang bersumber dari Dana Alokasi Umum DAU Tahun 2024

program dan kegiatan yang dirancang Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2024 terdiri dari :

Program/Kegiatan Bappelitbangda Tahun 2024

Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Dihasilkan
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian dan ikhtisar realisasi kinerja skpd dan laporan haasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Vertifikasi Keuangan SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Barang Milik Daerah
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara

PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Konsistensi Program RPD-RKPD
	Persentase Konsistensi Program RKPD-APBD
	Persentase Rata Rata Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Pendanaan yang Ditetapkan dengan Perda dan Perkada
Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)
Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah
Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik
Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota
Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pencapaian Target Indikator Perencanaan Pembangunan Daerah
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan antar dokumen perencanaan (RPD-Renstra, RKPD-Renja) Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
	Persentase Keselarasan antar dokumen perencanaan (RPD-Renstra, RKPD-Renja) Lingkup Bidang Perekonomian dan SDA
	Persentase Keselarasan antar dokumen perencanaan (RPD-Renstra, RKPD-Renja) Lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Keselarasan antar dokumen perencanaan (RPD-Renstra, RKPD-Renja) Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Keselarasan antar dokumen perencanaan (RPD-Renstra, RKPD-Renja) Lingkup Bidang Perekonomian dan SDA
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Keselarasan antar dokumen perencanaan (RPD-Renstra, RKPD-Renja) Lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD Pada Bidang Infrastruktur
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan

Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD Pada Bidang Kewilayahan
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil litbang yang dimanfaatkan oleh perangkat daerah
	Persentase Perangkat Daerah yang menghasilkan inovasi
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase hasil Kelitbangan bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang dimanfaatkan Perangkat Daerah
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan Ketatalaksanaan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi
Pengelolaan data kelitbangan dan peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terekelolah dengan baik
Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah Rekomendasi atas rencana penetapan Peraturan Basru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang diterbitkan
Fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan data dan pengkajian peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksana Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan
Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase hasil Kelitbangan Bidang Sosial dan Kependudukan yang di manfaatkan Perangkat Daerah
Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase hasil Kelitbangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang di manfaatkan Perangkat Daerah
Penelitian dan Pengembangan lingkungan hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup
Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase hasil Inovasi yang diterapkan di daerah
Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah dokumen hasil Penelitian, pengembangan dan perekayasaan di bidang teknologi dan inovasi
Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun / Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jmlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan rancang bangun /model replikasi dan invensi di bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi
Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelekteual

Tabel 5

RENCANA PROGRAM/KEGIATAN SKPD TAHUN 2024 dan PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025

Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

KODE		Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan	Bappelitbangda	100%	4,136,570,349	APBD		100%	4,177,936,052
	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah		100%	21,500,349			100%	21,715,352
	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah		8 Dok	15,000,000			8 Dok	15,150,000
	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian dan ikhtisar realisasi kinerja skpd dan laporan haasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd		5 Lap	3,500,000			5 Lap	3,535,000
	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		4 Lap	3,000,349			4 Lap	3,030,352
	02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	3,521,786,019			100%	3,557,003,879
	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN		46 Orang x 14 Bulan	3,496,786,019			46 Orang x 14 Bulan	3,531,753,879
	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Vertifikasi Keuangan SKPD		12 Dokumen	20,000,000			12 Dokumen	20,200,000

	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		18 Laporan	5,000,000			18 Laporan	5,050,000
2	03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Barang Milik Daerah		100%	4,000,000	APBD		100%	4,040,000
	01	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		12 Laporan	4,000,000			12 Laporan	4,040,000
	06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	116,400,000			100%	117,564,000
	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		4 Paket	4,000,000			4 Paket	4,040,000
	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		4 Paket	4,000,000			4 Paket	4,040,000
	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		5 Dokumen	5,400,000			5 Dokumen	5,454,000
	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		180 Laporan	100,000,000			180 Laporan	101,000,000
	07	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD		12 Dokumen	3,000,000			12 Dokumen	3,030,000
	01	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah		100%	25,000,000	APBD		100%	25,250,000
	02	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		10 Paket	10,000,000			10 Paket	10,100,000
	02	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		20 Unit	15,000,000			20 Unit	15,150,000
	01	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah		100%	341,999,651	APBD		100%	345,419,648
	02	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		414 Laporan	5,000,000			414 Laporan	5,050,000

	04	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	72,000,000	APBD		12 Laporan	72,720,000
	08	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	264,999,651			12 Laporan	267,649,648
	01	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah		100%	105,884,330			100%	106,943,173
	09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		15 Unit	29,354,000			15 Unit	29,647,540
	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	50,000,000			1 Unit	50,500,000
	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		30 Unit	26,530,330			30 Unit	26,795,633
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Konsistensi Program RPD-RKPD		100%	500,000,000			100%	505,000,000
	01		Persentase Konsistensi Program RKPD-APBD		100%				100%	
	01		Persentase Rata Rata Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah		100%				100%	
	03	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan dan pendanaan yang ditetapkan dengan Perda dan Perkada		100%	383,000,000			100%	386,830,000
	04	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)		3 dokumen	28,000,000			3 dokumen	28,280,000
	05	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah		3 dokumen	25,000,000			3 dokumen	25,250,000
	06	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik		2 Berita Acara	40,000,000			2 Berita Acara	40,400,000
	07	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah		1 Berita Acara	20,000,000			1 Berita Acara	20,200,000
	02	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota		1 Berita Acara	70,000,000			1 Berita Acara	70,700,000
	01	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan		1420 Usulan	25,000,000			1420 Usulan	25,250,000

03	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)		2 Dokumen	175,000,000	APBD		2 Dokumen	176,750,000
03	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah		100%	67,000,000			100%	67,670,000
03	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Bappelitbangda	3 Dokumen	67,000,000	APBD		3 Dokumen	67,670,000
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pencapaian target Indikator Perencanaan Pembangunan Daerah		100%	50,000,000			100%	50,500,000
	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah		8 Laporan	50,000,000			8 Laporan	50,500,000
01	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan antar dokumen perencanaan (RPD-Renstra, RKPD-Renja) Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		100%	400,000,000			100%	404,000,000
01		Persentase Keselarasan antar dokumen perencanaan (RPD-Renstra, RKPD-Renja) Lingkup Bidang Perekonomian dan SDA		100%				100%	
02		Persentase Keselarasan antar dokumen perencanaan (RPD-Renstra, RKPD-Renja) Lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah		100%				100%	
03	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Keselarasan antar dokumen perencanaan (RPD-Renstra, RKPD-Renja) Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		100%	95,000,000			100%	95,950,000
04	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)		48 Dokumen	5,000,000			48 Dokumen	5,050,000

05	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		48 Laporan	5,000,000			48 Laporan	5,050,000
06	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		48 Laporan	10,000,000			48 Laporan	10,100,000
07	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan		48 Laporan	30,000,000			48 Laporan	30,300,000
08	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		16 Dokumen	10,000,000			16 Dokumen	10,100,000
03	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		16 Laporan	5,000,000			16 Laporan	5,050,000
01	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		16 Laporan	10,000,000			16 Laporan	10,100,000
02	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia		16 Laporan	20,000,000			16 Laporan	20,200,000
03	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Keselarasan antar dokumen perencanaan (RPD-Renstra, RKPD-Renja) Lingkup Bidang Perekonomian dan SDA		100%	155,000,000			100%	156,550,000
04	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		16 Dokumen	15,000,000			16 Dokumen	15,150,000

05	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		16 Laporan	10,000,000			16 Laporan	10,100,000
06	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		16 Laporan	5,000,000			16 Laporan	5,050,000
07	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian		16 Laporan	10,000,000			16 Laporan	10,100,000
08	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		8 Dokumen	5,000,000			8 Dokumen	5,050,000
03	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA		8 Laporan	5,000,000			8 Laporan	5,050,000
01	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA		8 Laporan	5,000,000			8 Laporan	5,050,000
02	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA		8 Laporan	100,000,000			8 Laporan	101,000,000
03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Keselarasan antar dokumen perencanaan (RPD-Renstra, RKPD-Renja) Lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah		100%	150,000,000			100%	151,500,000
04	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		20 Dokumen	5,000,000			20 Dokumen	5,050,000

05	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		20 Laporan	5,000,000			20 Laporan	5,050,000
06	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		20 Laporan	20,000,000			20 Laporan	20,200,000
07	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD Pada Bidang Infrastruktur		20 Laporan	45,000,000			20 Laporan	45,450,000
08	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		52 Dokumen	5,000,000			52 Dokumen	5,050,000
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan		52 Laporan	5,000,000			52 Laporan	5,050,000
04	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Bappelitbangda	52 Laporan	20,000,000			52 Laporan	20,200,000
01	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD Pada Bidang Kewilayahan		52 Laporan	45,000,000			52 Laporan	45,450,000
01	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				500,000,000				505,000,000
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil litbang yang dimanfaatkan oleh perangkat daerah		100%	500,000,000			100%	505,000,000
		Persentase Perangkat Daerah yang menghasilkan inovasi		100%				100%	
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase hasil Kelitbangan bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang dimanfaatkan Perangkat Daerah		100%	300,000,000			100%	303,000,000

		Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah		1 Laporan	100,000,000			1 Laporan	51,000,000
		Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan Ketatalaksanaan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan		2 Laporan	100,000,000			2 Laporan	50,500,000
		Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi		1 Laporan	75,000,000			1 Laporan	50,500,000
		Pengelolaan data kelitbangan dan peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terekelolah dengan baik		1 Laporan	75,000,000			1 Laporan	50,500,000
	04	Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah Rekomendasi atas rencana penetapan Peraturan Basru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang diterbitkan						2 Rekomendasi	50,000,000
	01	Fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan data dan pengkajian peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanna Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan		1 Laporan	50,000,000			1 Laporan	50,500,000
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase hasil Kelitbangan Bidang Sosial dan Kependudukan yang di manfaatkan Perangkat Daerah						100%	50,500,000
		Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						1 Dokumen	50,500,000
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase hasil Kelitbangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang di manfaatkan Perangkat Daerah						100%	50,500,000
		Penelitian dan Pengembangan lingkungan hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup						1 Dokumen	50,500,000
		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase hasil Inovasi yang diterapkan di daerah		100%	100,000,000			100%	101,000,000

		Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah dokumen hasil Penelitian, pengembangan dan perekayasaan di bidang teknologi dan inovasi		1 Laporan	50,000,000			1 Laporan	50,500,000
		Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun / Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan rancang bangun /model replikasi dan invensi di bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi		5 Laporan	25,000,000			5 Laporan	25,250,000
		Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelekteual		3 Laporan	25,000,000			3 Laporan	25,250,000
						5,536,570,349				5,591,936,052

BAB V

P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedapankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development* (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Gavernance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Output Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang adalah **Program Tahunan** Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Rencana Kerja (RENJA) Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang selain menjadi Evaluasi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2024 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Bappelitbangda. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2024, RENJA juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang. RENJA juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan dan seluruh staf Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang.

